

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya sehingga penyusunan “LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019” ini dapat terselesaikan.

LKjIP SKPD Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menguraikan tentang perencanaan strategis, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Rembang, Januari 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang  
Kabupaten Rembang



**I. SUGIHARTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611101 199002 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Lampiran .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Landasan Hukum .....	1
I.3. Maksud dan Tujuan .....	2
I.4. Gambaran Umum Organisasi .....	2
I.5. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana .....	3
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
II.1. Rencana Strategis .....	7
II.1.1. Tujuan .....	7
II.1.2. Strategi.....	7
II.1.3. Sasaran.....	7
II.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	8
II.3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019 .....	8
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>11</b>
III.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
III.2. Perbandingan Antara Resntra Lama dan Renstra Baru .....	20
III.3. Realisasi Anggaran .....	26
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
IV.1. Tinjauan Umum Keberhasilan .....	30
IV.2. Permasalahan / Kendala .....	31
IV.3. Strategi Pemecahan Masalah .....	31
<b>LAMPIRAN</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/24/1999 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Dinas/Instansi diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang berpedoman pada SK Kepala LAN Nomor 239/IX/G/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menguraikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rencana Strategis Dinas yang memuat Tujuan, Sasaran, dan Program serta uraian Kegiatan Tahun 2019 dibahas secara rinci.

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran organisasi telah merumuskan tujuannya, yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas air baku
3. Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun 2019 terkait dengan perumusan tujuan diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan.
3. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Irigasi.
4. Mengingkatkannya Kualitas Pemanfaatan Ruang.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, sudah dituangkan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan yang memuat agenda kebijakan dan program serta berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan beberapa sumber dana yang ada.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang, antara lain dengan meningkatkan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang ke-PU-an dengan mengalokasikan dana dari berbagai sumber baik yang berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten serta dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tahun 2019 sebesar Rp. 1.222.552.000,00 dari anggaran (target) Rp. 1.020.000.000,00 atau 119,85 % . Meliputi realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Rp. 1.174.132.000,00 dari anggaran (target) Rp. 1.000.000.000,00 atau 117,41 % dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 48.420.000,00 dari anggaran (target) Rp. 20.000.000,00 atau 242,1 %.

Untuk perhitungan keuangan kegiatan - kegiatan tahun anggaran 2019 dari dana yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sebesar Rp.112.700.393.719,00. Dalam realisasinya terserap sebesar Rp.93.426.029.105,00 atau 82,90 %.

Anggaran sebesar Rp. 112.700.393.719,00 dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.461.285.319,00 atau 7,50 % dari total anggaran dan belanja langsung sebesar Rp.104.239.108.400,00 atau 92,50 % dari total anggaran.

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 8.108.914.883,00 atau 95,84 % dari anggaran yang tersedia Rp.8.461.285.319,00 sedangkan realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp.85.317.114.222,00 atau 81,85 % dari anggaran sebesar Rp. 104.239.108.400,00.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. PERJANJIAN KINERJA
2. PENGUKURAN KINERJA
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
5. STRUKTUR/BAGAN ORGANISASI
6. RENAKSI
7. EVALUASI INTERNAL
8. PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. LATAR BELAKANG**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

#### **I.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran OPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

### **I.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **I.5. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA**

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dan jajaran dibawahnya :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Bidang Bina Marga dan jajaran di bawahnya
  - a. KaSie Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - b. KaSie Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - c. KaSie Pengelolaan Drainase dan Air Limbah
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air
  - a. KaSie Pembangunan Sumber Daya Air
  - b. KaSie Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
  - c. KaSie Penyediaan Sumber Air Minum
5. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pembinaan Jasa Konstruksi
  - a. KaSie Perencanaan Tata Ruang
  - b. KaSie Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
  - c. KaSie Pembinaan Jasa Konstruksi
6. Ka UPT Pengelola Alat Berat dan Laboratorium
7. Ka UPT DPUTARU Wilayah Barat
8. Ka UPT DPUTARU Wilayah Tengah
9. Ka UPT DPUTARU Wilayah Timur

(Untuk Ka UPT mulai nomer 6 s/d 9 secara struktur di bawah langsung oleh Kepala Dinas.)

## 1. Susunan Kepegawaian

**Tabel 1.1**

Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Rembang  
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	47
3.	Golongan II	47
4.	Golongan I	9
	<b>Jumlah</b>	<b>108</b>

*Sumber* : Sekretariat sub.bag.Umum dan Kepegawaian DPUTARU Kabupaten Rembang

Berdasarkan data dari tabel 1 diketahui bahwa birokrasi pemerintah di jalankan secara hirarki dan berjenjang.

**Tabel 1.2**

Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang  
Sesuai Struktur Organisasi

No.	Pejabat	Jumlah
1.	Struktural	18
2.	Fungsional Umum	90
	<b>Jumlah</b>	<b>108</b>

*Sumber* : Sekretariat sub.bag.Umum dan Kepegawaian DPUTARU Kabupaten Rembang

Dari total 108 pegawai di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, yang menduduki jabatan struktural sebanyak 18 orang sedangkan sisanya sejumlah 90 adalah sebagai pelaksana dan jabatan fungsional umum.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang mempekerjakan 15 tenaga honorer yang masing-masing ditempatkan di bidang-bidang, seksi-seksi dan UPT guna membantu kelancaran kerja.

Berikut data penempatan tenaga honorer di lingkup kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang :

1. Sekretariat = 2 orang
2. Bidang Bina Marga = 2 orang
3. Bidang Tata Ruang dan Pembinaan Jasa Konstruksi = 1 orang
4. UPT Pengelolaan Alat Berat = 6 orang
5. UPT DPU Wilayah Barat = 2 orang

**Tabel 1.3**

Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang  
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	9
2.	Strata 1	23
3.	D3	7
4.	SLTA	50
5.	SLTP	9
6.	SD	10
	<b>Jumlah</b>	<b>108</b>

*Sumber* : Sekretariat Sub.bag. Umum dan Kepegawaian DPUTARU Kabupaten Rembang

Dari tabel 3 dapat di jelaskan bahwa dengan jumlah pegawai (PNS) dengan komposisi yang tidak berimbang mengakibatkan optimalisasi dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang menjadi tidak maksimal.

Kekurangan tenaga-tenaga teknis pekerjaan umum dan penataan ruang karena adanya PNS yang purna tugas dan belum ada penggantinya. Menyebabkan menurunnya kualitas profesionalisme dan menjadi terhambatnya kegiatan-kegiatan fisik infrastruktur di lingkup kerja dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

## 2. Sarana Prasarana

Berikut di bawah ini tabel penyajian data aset, inventaris barang dan sarana/prasarana yang menunjang kinerja di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

**Tabel 1.4**

Barang Inventaris / Sarana Prasarana

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah	762.868 m2	Baik	
2	Bangunan/gedung	9 Unit	Baik	
3	Perlengkapan kantor - Tablet - Komputer - Laptop/Netbook/Note Book - Printer - AC - Slide Projector - Drone - APAR	2 Unit 20 Unit 42Unit 39 Unit 14 Unit 2 Unit 1 Unit 7 Buah	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	
4	Peralatan kantor - Mesin pemotong rumput - Roller/ Walls - Stamper - Pemotong Aspal/Beton - Bekhoe Loader - Excavator - Jack Hammer	1 Unit 19 unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	
5	Kendaraan operasional - Roda 2 - Roda 4 - Truk Trailer	23 unit 13 unit 2 unit	Baik Baik Baik	

**Sumber** : Pengurus Barang (SIMDA Aset) DPUTARU Kabupaten Rembang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **II.1.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021.

#### **II.1.2. TUJUAN**

4. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas air baku
6. Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang

#### **II.1.3. STRATEGI**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
2. Peningkatan pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3. Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

#### **II.1.4. SASARAN**

5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
6. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan.
7. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Irigasi.
8. Mengingkatkan Kualitas Pemanfaatan Ruang.

## II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Komponen Rencana Kinerja meliputi : Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator kegiatan. Sasaran dan program telah dibahas tersebut diatas. Adapun kegiatan adalah tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Berikut di bawah ini adalah tabel penjelasannya.

**Tabel 2.1**

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 %
2.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik	69,75 %
		Prosentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik	89,94 %
3.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Irigasi	Persentase akses irigasi dalam kondisi baik	26 %
4.	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang	Persentase penyediaan informasi penataan ruang	75 %

## II.3. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2019

Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ternyata Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 tidak mengalami perubahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dengan  
 Kepala Daerah Tahun 2019 sebagaimana berikut :

**Tabel 2.2**

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja, Program dan Anggaran  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 %	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.2.946.403.000,- Rp. 134.000.000,- Rp. 510.000.000,-
2	Meningkatnya Pemerataan Dan Kualitas Pembangunan Jalan Dan Jembatan	1. Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik 2. Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik	69,75 % 89,94 %	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 5. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 6. Program Pemeliharaan	Rp.62.053.725.400,- Rp.12.794.525.000,- Rp.500.000.000,- Rp.650.000.000,- Rp.17.093.300.000,-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Rp.600.000.000,-
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Irigasi	Persentase akses Irigasi dalam Kondisi Baik	89.94 %	1. Program Pembangunan Sistem Informasi Irigasi 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 3. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.	Rp. 107.561.750,- Rp. 3.199.593.250,- Rp. 3.170.000.000,-
4.	Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang	Persentase Penyediaan Informasi Penataan Ruang	75 %	1. Program Pembinaan Jasa Konstruksi 2. Program Perencanaan Tata Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 55.000.000,- Rp. 270.000.000,- Rp. 155.000.000,-

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas diperlukan suatu alat manajemen yang disebut pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pengukuran Kinerja merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil (terlampir).

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2019 ada 2 (dua) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Kinerja
2. Akuntabilitas Keuangan

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- 90 - 100 = Amat Baik
- 80 - 89 = Baik
- 50 - 79 = Cukup Baik
- < 49 = Kurang

### III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hingga akhir tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 4 sasaran strategis.

1. Sasaran strategis pertama Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target capaian 95 % dan Realisasi 100% sehingga capaian sasaran sebesar 105,26%, termasuk dalam kategori berhasil.

Adapun seluruh capaian sasaran disajikan dalam bentuk tabel III. 1 dibawah ini :

No.	Indikator Sasaran	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)	Capaian 2017 (%)	Target RPJMD s/d 2021	Capaian s/d 2019 Terhadap Target RPJMD s/d 2021
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	100 %	105,26%	-	-	100%	100 %

Sumber : Sekretariat DPUTARU Kabupaten Rembang

Pada tahun 2019 capaian sasaran Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Publik dengan target 95 % dan terealisasi 100%, sehingga capaian sasaran sebesar 105,26 % termasuk dalam kategori sangat baik.

$$Efektivitas = \left\{ \frac{Capaian\ Kinerja}{Target\ Kinerja} \times 100\% \right\}$$

$$Efektivitas = \left\{ \frac{100\%}{95\%} \times 100\% \right\}$$

$$Efektivitas = 105.26\%$$

$$Efisiensi = 100\% - \left\{ \frac{Realisasi\ Biaya}{Target\ Biaya} \times 100\% \right\}$$

$$Efisiensi = 100\% - \left\{ \frac{3.259.316.336}{3.456.403.000} \times 100\% \right\}$$

$$Efisiensi = 100\% - \{ 94,30\% \}$$

$$Efisiensi = 5.70\%$$

Pada tahun 2019 dari target anggaran Rp. 3.456.403.000,- terelalisasi anggaran Rp. 3.259.316.336,-. Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi program untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Publik pada tahun 2019 sebesar 5.70 % sehingga dapat di kategorikan termasuk dalam kategori sangat efisien.

2. Sasaran strategis kedua Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Perwujudan Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik dilaksanakan pada penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum yang meliputi antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, dan wilayah cepat tumbuh menjadi prasyarat utama dalam mendorong pengembangan wilayah sebagaimana telah menjadi titik berat pilar pertama prioritas pembangunan daerah yaitu melalui program Pembangunan jalan dan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan untuk menunjang peningkatan infrastruktur ke-PU-an.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran melalui indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebagaimana tertuang dalam tabel III.2.

Capaian Kinerja sasaran Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik.

No.	Indikator Sasaran	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)	Capaian 2017 (%)	Target RPJMD s/d 2021	Capaian s/d 2018 Terhadap Target RPJMD s/d 2021
1.	Prosentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik	69,75%	85,53 %	122,62%	102,88%	101,70%	85%	79,89 %

Sumber : Bidang Bina Marga DPUTARU Kabupaten Rembang

$$Realisasi = \left\{ \frac{Panjang\ Jalan\ Dalam\ Kondisi\ Baik\ (Km)}{Seluruh\ Panjang\ Jalan\ Kabupaten\ (Km)} \times 100\ \% \right\}$$

$$Realisasi = \left\{ \frac{508,13}{594,10} \times 100\ \% \right\}$$

$$Realisasi = 85,53\ \%$$

$$Capaian\ Kinerja = \left\{ \frac{Realisasi}{Target} \times 100\ \% \right\}$$

$$Capaian\ Kinerja = \left\{ \frac{85,53}{69,75} \times 100\ \% \right\}$$

$$Capaian\ Kinerja = 122,62\ \%$$

Secara akumulatif prosentase infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik, dimana dari target 69,75% di tahun 2019 ini terealisasi 85,53 % atau mencapai 508,13 km dari total panjang jalan kabupaten 594,10 km sehingga capaian sasaran sebesar 122,62% termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Di tahun 2018 secara akumulatif prosentase infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik dimana capaian sasaran sebesar 102,88%, termasuk dalam kategori berhasil. Dari data tersebut dapat di perbandingkan secara akumulatif adanya *kenaikan* capaian di tahun 2018 dan 2019 yaitu 19,74 %.

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \left\{ \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \% \right\} \\ \text{Efektivitas} &= \left\{ \frac{85.53 \%}{69.75 \%} \times 100 \% \right\} \\ \text{Efektivitas} &= 122.62 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= 100 \% - \left\{ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \% \right\} \\ \text{Efisiensi} &= 100 \% - \left\{ \frac{71.880.860.599}{89.291.550.400} \times 100 \% \right\} \\ \text{Efisiensi} &= 100 \% - \{ 80,50 \% \} \\ \text{Efisiensi} &= 19.50 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 dari target anggaran Rp. 89.291.550.400,- terelalisasi anggaran Rp. 71.880.860.599,-. Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi untuk mewujudkan Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 19.50 % sehingga dapat di kategorikan termasuk dalam kategori efisien.

Untuk mewujudkan Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik. dilaksanakan pada penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum yang meliputi antara lain pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan wilayah cepat tumbuh menjadi prasyarat utama dalam mendorong pengembangan wilayah sebagaimana telah menjadi titik berat pilar pertama prioritas pembangunan daerah yaitu melalui program pembangunan dan pemeliharaan jembatan..

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran melalui indikator Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik. sebagaimana tertuang dalam table III. 3

No.	Indikator Sasaran	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)	Capaian 2017 (%)	Target RPJMD s/d 2021	Capaian s/d 2018 Terhadap Target RPJMD s/d 2021
1.	Prosentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik	89,94%	92,06 %	102,35%	108,65%	110,90%	92,06%	97,41 %

Sumber : Bidang Bina Marga DPUTARU Kabupaten Rembang

$$Realisasi = \left\{ \frac{\text{Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik (Unit)}}{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten (Unit)}} \times 100 \% \right\}$$

$$Realisasi = \left\{ \frac{116}{126} \times 100 \% \right\}$$

$$Realisasi = 92,06 \%$$

$$Capaian Kinerja = \left\{ \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \% \right\}$$

$$Capaian Kinerja = \left\{ \frac{92,06}{89,94} \times 100 \% \right\}$$

$$Capaian Kinerja = 102,35 \%$$

Secara akumulatif Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik. dimana dari target 89,94% di tahun 2019 ini terealisasi 92,06% dari total jumlah jembatan kewenangan Kabupaten Rembang sejumlah 116 unit dalam kondisi baik, dari total jumlah 126 unit, sehingga capaian sasaran sebesar 102,35% termasuk dalam berhasil.

Di tahun 2018 secara akumulatif Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik dimana dari target 82,54% terealisasi 89,68%. Dari total jumlah 126 unit sejumlah 111 unit dalam kondisi baik sehingga capaian sasaran sebesar 108,65%, termasuk dalam kategori cukup berhasil. Dari data tersebut dapat di perbandingkan secara akumulatif adanya penurunan capaian di tahun 2018 dan 2019 yaitu 6,3%. Meskipun terjadi penurunan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai sasaran Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik masih dapat dikatakan berhasil karena sudah melampaui target yang dibebankan dalam RPJMD Kabupaten Rembang yaitu sebesar 89,94% dengan capaian 92,06%.

$$Efektivitas = \left\{ \frac{Capaian\ Kinerja}{Target\ Kinerja} \times 100\% \right\}$$

$$Efektivitas = \left\{ \frac{92,06\%}{89,94\%} \times 100\% \right\}$$

$$Efektivitas = 102.36\%$$

$$Efisiensi = 100\% - \left\{ \frac{Realisasi\ Biaya}{Target\ Biaya} \times 100\% \right\}$$

$$Efisiensi = 100\% - \left\{ \frac{2.418.335.000}{3.250.000.000} \times 100\% \right\}$$

$$Efisiensi = 100\% - \{ 74,41\% \}$$

$$Efisiensi = 25.59\%$$

Pada tahun 2019 dari target anggaran Rp. 3.250.000.000,- terelalisasi anggaran Rp. 2.418.335.000,-. Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi untuk mewujudkan Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 25.59 % sehingga dapat di kategorikan termasuk dalam kategori efisien.

### 3. Sasaran strategis ketiga Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.

Untuk mencapai Persentase akses irigasi dalam kondisi baik, melalui program pembangunan jaringan irigasi dan program rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, yang diarahkan untuk meningkatkan akses irigasi dalam kondisi baik, dan mengoperasikan prasarana dan sarana saluran irigasi untuk keperluan irigasi pertanian.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi. Dengan indikator sasaran Persentase akses irigasi dalam kondisi baik. Untuk tahun 2018 sebagai berikut :

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran melalui indikator Persentase akses irigasi dalam kondisi baik sebagaimana tertuang dalam tabel Tabel III.4

No.	Indikator Sasaran	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)	Capaian 2017 (%)	Target RPJMD s/d 2021	Capaian s/d 2019 Terhadap Target RPJMD s/d 2021
1.	Persentase akses irigasi dalam kondisi baik	26%	30%	115,38%	100,76%	127,22%	98,12%	89 %

Sumber : Bidang Sumber Daya Air DPUTARU Kabupaten Rembang

$$\text{Realisasi} = \left\{ \frac{\text{Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Luas Irigasi Kabupaten}} \times 100 \% \right\}$$

$$\text{Realisasi} = \left\{ \frac{6.358,03}{21.193,45} \times 100 \% \right\}$$

$$\text{Realisasi} = 30 \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \left\{ \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \right\}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \left\{ \frac{30}{26} \times 100 \% \right\}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 115,38 \%$$

Pada tahun 2019 capaian sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi dengan target 26 % dan terealisasi 30 %. Dari total luas irigasi 21.193,45 m<sup>2</sup>, luas rigasi dalam kondisi baik sejumlah 6.358,03 m<sup>2</sup> sehingga capaian sasaran sebesar 115,38 %, termasuk dalam kategori sangat baik.

Sedangkan pada tahun 2018 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi dengan target 86,34 % terealisasi 87,00 % dengan capaian sasaran sebesar 100,76 %.

Dari data tersebut dapat di perbandingkan secara akumulatif adanya *kenaikan* capaian di tahun 2018 dan 2019 yaitu 14,62 %.

$$\text{Efektivitas} = \left\{ \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \% \right\}$$

$$\text{Efektivitas} = \left\{ \frac{30 \%}{26 \%} \times 100 \% \right\}$$

$$\text{Efektivitas} = 115,38 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 100 \% - \left\{ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \% \right\}$$

$$\text{Efisiensi} = 100 \% - \left\{ \frac{6.137.264.782}{6.477.155.000} \times 100 \% \right\}$$

$$\text{Efisiensi} = 100 \% - \{ 94,75 \% \}$$

$$\text{Efisiensi} = 5,25 \%$$

Pada tahun 2019 dari target anggaran Rp. 6.477.155.000,- terelalisasi anggaran Rp. 6.137.264.782,-. Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi untuk mewujudkan Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi pada tahun 2019 sebesar 5,25 % sehingga dapat di kategorikan termasuk dalam kategori sangat efisien.

#### 4. Sasaran strategis keempat Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang melalui program Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota, Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang, dan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, yang diarahkan untuk meningkatkan presentase penyediaan informasi penataan ruang.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang. Dengan indikator sasaran presentase penyediaan informasi penataan ruang, untuk tahun 2019 sebagai berikut :

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran melalui indikator Persentase penyediaan informasi penataan ruang. sebagaimana tertuang dalam tabel Tabel III.5

No.	Indikator Sasaran	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)	Capaian 2017 (%)	Target RPJMD s/d 2021	Capaian s/d 2018 Terhadap Target RPJMD s/d 2021
1.	Persentase penyediaan informasi penataan ruang	75%	100%	133,33%	-	-	100%	100 %

Sumber : Bidang Sumber Daya Air DPUTARU Kabupaten Rembang

$$Realisasi = \left\{ \frac{\text{Jumlah Peta Informasi Tata Ruang}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100 \% \right\}$$

$$Realisasi = \left\{ \frac{14}{14} \times 100 \% \right\}$$

$$Realisasi = 100 \%$$

$$Capaian Kinerja = \left\{ \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \% \right\}$$

$$Capaian Kinerja = \left\{ \frac{100}{75} \times 100 \% \right\}$$

$$Capaian Kinerja = 133,33 \%$$

Pada tahun 2019 Capaian sasaran Persentase penyediaan informasi penataan ruang dengan target 75 % dan terealisasi 100%, sehingga capaian sasaran sebesar 133,33 %. termasuk dalam kategori sangat baik.

$$Efektivitas = \left\{ \frac{Capaian Kinerja}{Target Kinerja} \times 100 \% \right\}$$

$$Efektivitas = \left\{ \frac{100 \%}{75 \%} \times 100 \% \right\}$$

$$Efektivitas = 133,33 \%$$

$$Efisiensi = 100 \% - \left\{ \frac{Realisasi\ Biaya}{Target\ Biaya} \times 100 \% \right\}$$
$$Efisiensi = 100 \% - \left\{ \frac{461.331.528}{480.000.000} \times 100 \% \right\}$$
$$Efisiensi = 100 \% - \{ 96,11 \% \}$$
$$Efisiensi = 3,89 \%$$

Pada tahun 2019 dari target anggaran Rp. 480.000.000,- terelalisasi anggaran Rp. 461.331.528,-. Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi untuk mewujudkan Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi pada tahun 2019 sebesar 3,89 % sehingga dapat di kategorikan termasuk dalam kategori sangat efisien

**III.2. PERBANDINGAN ANTARA RENSTRA LAMA DAN RENSTRA BARU**

No.	RENSTRA LAMA		RENSTRA BARU	
	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Pembangunan Jalan 2. Pembangunan Jembatan 3. BOP Pembangunan Jalan	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan 3. Penataan/ Pemeliharaan Trotoar	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat daerah	1. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum  2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur  4. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
3	Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan	1. Pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan	Program peningkatan keterbukaan informasi public	1. Pengelolaan keterbukaan informasi public
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan 2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat -	Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Pembangunan jalan dan jembatan 2. Pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Pembangunan

		alat Berat		dan pemeliharaan saluran drainase/ gorong – gorong  4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1. Pembangunan Sumber Daya Air 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air 3. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
6	Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1. Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong - gorong	Program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	1. Perencanaan tata ruang 2. Pemanfaatan tata ruang 3. Pengendalian pemanfaatan tata ruang
7	Program pembangunan sistem informasi irigasi	1. Pembangunan sistem informasi irigasi		
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3. Rehabilitasi/ Pemeliharaan		

		<p>Normalisasi Saluran Sungai</p> <p>4. Pemberdayaan Petani Pemakai Air</p> <p>5. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola Irigasi Partisipatif (WISMP)</p> <p>6. Pembangunan Jaringan Irigasi</p>		
9	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	<p>1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya</p>		
10	Program penyediaan dan pengolahan air baku	1. Penyediaan dan pengolahan air baku		
11	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		
12	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		
13	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	<p>1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan</p> <p>2. BOP Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)</p> <p>3. BOP DAK dan Sanitasi</p> <p>4. Fasilitasi SANIMAS</p>		
14	Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah	1. Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah		
15	Program pembinaan jasa	1. Pembinaan jasa		

	konstruksi	konstruksi		
16	Program Pengawasan Jasa Kontruksi	1. Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa kontruksi 2. Pengawasan tertib pemanfaatan jasa kontruksi 3. Pengawasan terhadap perijinan jasa kontruksi 4. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 5. Pengawasan terhadap K- 3		
17	Program Pemberdayaan Jasa Kontruksi	1. Pemberdayaan Penyedia Jasa Kontruksi ( Orang perseorangan, badan usaha) 2. Pemberdayaan Pengguna Jasa Kontruksi (Instansi Pemerintah, Orang perseorangan, badan usaha)		
18	Program Pengaturan Jasa Kontruksi	1. Sosialisasi dan diseminasi Peraturan Perundang – undangan jasa kontruksi dan peraturan lainnya yang terkait 2. Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa kontruksi		
19	Program perencanaan tata ruang	1. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang 2. Penetapan		

		<p>Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL</p> <p>3. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan Tentang Rencana Tata Ruang</p> <p>4. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah</p> <p>5. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan</p> <p>6. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan</p> <p>7. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan</p> <p>8. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW</p> <p>9. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang</p> <p>10. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang</p> <p>11. Revisi Rencana Tata Ruang</p> <p>12. Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang</p> <p>13. Survey dan Pemetaan</p> <p>14. Koordinasi dan</p>		
--	--	---	--	--

		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang 15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		
20	Program pengendalian pemanfaatan ruang	1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Penyusunan Prosedur dan Manual Penendalian Pemanfaatan Ruang 3. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4. Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5. Pengawasan Pemanfaatan Ruang 6. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/ Kota 7. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9. Inventarisasi bangunan - bangunan		

### III.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Rembang secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka sangat dibutuhkan alokasi biaya dari berbagai sumber anggaran, baik yang berasal dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten maupun sumber anggaran lainnya yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk perhitungan keuangan kegiatan - kegiatan tahun anggaran 2019 dari anggaran yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Rembang sebesar Rp. 112.700.393.719,00 Dalam realisasinya terserap sebesar Rp. 93.426.029.105,00 atau 82,90%.

Anggaran sebesar Rp. 112.700.393.719,00 dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.461.285.319,00 atau 7,50 % dari total anggaran dan belanja langsung sebesar Rp.104.239.108.400,00 atau 92,50 % dari total anggaran.

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 8.108.914.883,00 atau 95,84 % dari anggaran yang tersedia Rp. 8.461.285.319,00 sedangkan realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp.85.317.114.222,00 atau 81,85 % dari anggaran sebesar Rp. 104.239.108.400,00.

Realisasi serapan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 tersajikan pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019**

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%	
1.	Sasaran	:	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>			
	Program	:	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
	Kegiatan	:	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.880.500	98,81
			2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10.000.000,00	8.250.000	82,50
			3. Penyusunan Renstra, Renja	30.000.000,00	24.819.100	82,73
			4. Penyusunan Dokumen-Dokumen Anggaran	10.000.000,00	8.500.000,00	85,00
			5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang	49.000.000,00	44.611.025,00	91,04
			6. Penyusunan Standar Satuan Harga	25.000.000,00	22.000.000	88,00
	Program	:	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
	Kegiatan	:	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	1.245.000,00	41,50
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.375.000,00	87.070.446,00	72,94
			3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	17.929.000,00	51,23
			4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	500.000.000,00	485.119.000,00	97,02
			5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	70.000.000,00	68.532.400,00	97,90
			6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	62.100.000,00	88,71
			7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	11.980.400,00	59,90
			8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	18.005.000,00	72,02
			9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.000.000,00	20.518.500,00	93,27
			10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	8.935.000,00	89,35
			11. Penyediaan Makanan dan Minuman	60.000.000,00	56.391.000,00	93,99
			12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	125.000.000,00	102.771.000,00	82,22
			13. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	1.812.028.000,00	1.773.438.400,00	97,87
			14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	75.000.000,00	50.714.550,00	67,62
	Program	:	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
	Kegiatan	:	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	510.000.000,00	494.566.640,00	96,97
			2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	200.000.000,00	196.513.400,00	98,26
			3. Pengadaan peralatan kantor	160.000.000,00	152.162.340,00	95,10
			4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000,00	49.740.000,00	99,48
			5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000,00	96.150.900,00	96,15
2.	Sasaran	:	<b>Meningkatnya Pemerataan Dan Kualitas Pembangunan Jalan Dan Jembatan</b>			

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>Program</b> : <b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>			
	<b>Kegiatan</b> : 1. Perencanaan Pembangunan Jalan	100.000.000,00	99.155.000,00	99,16
	2. Pembangunan Jalan	33.815.168.400,00	25.891.639.976,00	76,57
	3. Pembangunan Jembatan	2.550.000.000,00	1.718.643.000,00	67,40
	4. Peningkatan Jalan	25.388.557.000,00	18.237.385.450,00	71,83
	5. Pelebaran Jalan	200.000.000,00	190.382.000,00	95,19
	<b>Program</b> : <b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>			
	<b>Kegiatan</b> : 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	11.000.000.000,00	10.989.718.360,00	99,91
	2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	700.000.000,00	699.692.000,00	99,96
	3. Penataan/Pemeliharaan Trotoar	1.094.525.000,00	1.072.070.000,00	97,95
	<b>Program</b> : <b>Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan</b>			
	<b>Kegiatan</b> : 1. Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	500.000.000,00	497.844.000,00	99,57
	<b>Program</b> : <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>			
	<b>Kegiatan</b> : 1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat	650.000.000,00	625.823.152,00	96,28
	<b>Program</b> : <b>Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - gorong</b>			
	<b>Kegiatan</b> : 1. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - gorong	17.093.300.000,00	14.847.435.813,00	86,86
	<b>Program</b> : <b>Program Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong</b>			
	<b>Kegiatan</b> : 1. Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong - gorong	600.000.000,00	553.074.000,00	92,18
<b>3.</b>	<b>Sasaran</b> : <b>Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Irigasi</b>			
	<b>Program</b> : <b>Program Pembangunan Sistem Informasi Irigasi</b>			
	<b>Kegiatan</b> : 1. Inventrisasi Aset Irigasi	107.561.750,00	106.253.750,00	98,78
	<b>Program</b> : <b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>			
	<b>Kegiatan</b> : 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.019.218.250,00	1.697.371.732,00	84,06
	2. Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.090.000.000,00	1.080.104.300,00	99,09
	3. Operasional Komisi Irigasi	90.375.000,00	83.535.000,00	92,43
	<b>Program</b> : <b>Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b>			
	<b>Kegiatan</b> : 1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	3.170.000.000,00	3.088.278.200,00	97,42
<b>4.</b>	<b>Sasaran</b> : <b>Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang</b>			
	<b>Program</b> : <b>Program Pembinaan Jasa Konstruksi</b>			
	<b>Kegiatan</b> : 1. Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	25.000.000,00	23.817.800,00	95,27
	2. Fasilitasi Ijin Usaha Konstruksi	30.000.000,00	29.302.500,00	97,68
	<b>Program</b> : <b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>			
	<b>Kegiatan</b> : 1. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	50.000.000,00	46.394.978,00	92,79
	2. Survey dan Pemetaan	70.000.000,00	69.814.000,00	99,73
	3. Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota	150.000.000,00	142.619.600,00	95,08
	<b>Program</b> : <b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>			
	<b>Kegiatan</b> : 1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang	60.000.000,00	58.380.000,00	97,30

<b>NO</b>	<b>SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
	2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	40.000.000,00	37.659.950,00	94,15
	3. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	25.000.000,00	23.497.850,00	93,99
	4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.000.000,00	29.844.850,00	99,48

**Sumber** : Sekretariat Sub.Bag. Program dan Keuangan (SIMDA Keuangan) DPUTARU Kabupaten Rembang

Penerimaan dan pengeluaran anggaran ini dapat dirinci untuk setiap program dan kegiatan. (*Lampiran : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019*).

## BAB IV PENUTUP

### IV.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber anggaran keuangan dan sarana secara efektif dan se efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan *Berhasil*, memiliki nilai 115,79 yang berarti kinerja yang dilaksanakan dikategorikan **Amat Baik**. Hasil tersebut didukung dengan data terlampir.

## **IV.2. PERMASALAHAN / KENDALA**

Dalam usaha mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terdapat kendala – kendala antara lain :

1. Mundurnya jadwal waktu pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terutama infrastruktur dimulai bulan Juli-Desember 2019
2. Banyaknya aspirasi / tuntutan masyarakat yang harus segera ditangani terutama kerusakan jalan dan prasarana pengairan / irigasi
3. Minimumnya curah hujan yang mengakibatkan ketersediaan air baku untuk air irigasi tidak mencukupi
4. Keterbatasan personil teknis maupun non teknis dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan
5. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun

## **IV.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas dan langkah antisipasif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang adalah :

1. Melakukan pendekatan persuasif kepada perusahaan-perusahaan peserta lelang
2. Melakukan penyesuaian jumlah dan jadwal pelaksanaan kegiatan demi kualitas dan ketepatan jangka waktu penyelesaian kegiatan
3. Berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk mempercepat legalitas administrasi
4. Segera menangani kerusakan ruas jalan, prasarana pengairan / irigasi
5. Melaksanakan pembangunan penampung air baku, mengupayakan penghematan penggunaan air dan melaksanakan layanan pemberian air secara giliran.
6. Pemanfaatan seoptimal mungkin jumlah personil dan sarana mobilitas penanganan program – program ke-PU-an
7. Mengusahakan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Rembang, Januari 2020



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang  
Kabupaten Rembang

**Ir. SUGIHARTO, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611101 199002 1 002

# LAMPIRAN